**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Later Belakang Penelitian**

Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 *Jo.* No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 *Jo.* No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.

Otonomi Daerah memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pemberian otonomi tersebut bertujuan agar pemerintah kota atau kabupaten dapat melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan lebih dekat dengan rakyatnya. Wujud otonomi daerah berupa hak, kewajiban dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing sedangkan pelaksanaannya berupa penyerahan urusan pemerintahan dan sumber-sumber pembiayaan serta pegawai kepada pemerintah daerah dengan segala tanggungjawabnya.

Pemberian otonomi kepada pemerintah merupakan hal yang esensial dalam politik yang demokratis, karena membuka kemungkinan yang lebih luas bagi warga negara untuk melibatkan diri dalam proses politik, membuat keputusan atasdasar kebutuhan daerah, mendidik masyarakat untuk berdemokrasi, mengembangkan kepemimpinan politik, memudahkan penyelenggaraan pelayanan dan lainnya. Pemerintah daerah mendapat tantangan untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih aktif dan inovatif dengan hak, kewajiban dan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri. Disamping itu masyarakat juga akan lebih dekat kepada berbagai pelayanan yang pada saatnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasarannya tiada lain untuk mensejahterakan masyarakat daerah masing-masing dalam berbagai aspek pembangunan. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan pelayanan umum yang makin adil dan merata, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, sedangkan pemerintah berfungsi mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat tersebut. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah bersifat saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Memberikan respon terhadap berbagai perubahan serta guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, setiap aparat pemerintah (pegawai negeri) semakin dituntut untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya. Hal ini sejalan dengan Siagian (2000:210) yang menyatakan “Profesionalisme dan spesialisasi sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintah karena kemampuan seseorang dapat menguasai seluruh seluk beluk tugasnya yang amat kompleks itu secara mendalam”. Pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia sebagai penggerak pada organisasi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, selain itu juga memiliki kepribadian yang baik, karena pada hakekatnya kepribadian merupakan sumber karier dan prestasi kerja, tapi tentu saja aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional perlu mendapat perhatian. Seorang yang profesional hendaknya mampu memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya baik yang berupa tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual maupun tanggung jawab moral dan spiritual sehingga dalam lingkungan pekerjaan profesionalisme menjadi tolok ukur, dimana pegawai yang profesional akan menciptakan kreativitas baru. Seperti apa yang dihasilkan dalam penelitian Hadadi (2012:317) bahwa “pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, serta dapat memberikan kesempatan kepada semua pegawai yang memenuhi persyaratan, menjadikan tingkat profesionalisme yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai”.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan umum yang optimal tidak dapat dihindari, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan umum yang cepat dan tepat waktu. Dengan demikian, tuntutan masyarakat telah bergeser menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin dinamik dengan tingkat penghidupan dan pendidikan yang semakin baik pula, secara perlahan telah berhadapan dengan kewajiban pemerintah, yaitu bahwa masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Pemikiran tersebut dapat diperkuat dengan hasil penelitian Purwadi (2010:218) bahwa “Untuk meningkatkan profesionalisme, maka disarankan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai yang diamanatkan di dalam peraturan pemerintah menjadi pegawai yang profesional”. Hal ini tidak lain untuk menjawab perkembangan masyarakat yang semakin maju.

Keluhan dan tuntutan masyarakat itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi aparatur di dalam melaksanakan fungsinya, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu, maka peningkatan profesionalisme aparatur untuk mampu bekerja secara produktif dan tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang menghendaki kualitas pelayanan secara maksimal, perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan sebagai abdi negara. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap lingkungan kehidupan masyarakat, maka tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat, salah satu cara dilakukan melalui koordinasi.

Koordinasi menurut Sugandha (2003:13) mengandung makna “adanya keterpaduan atau keserasian serta kesimultanan seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi”. Tanpa adanya usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian dalam organisasi maupun di luar organisasi, maka organisasi tidak dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugasnya mencapai tujuan. Masalah sumber-sumber atau potensi dari pegawai yang ada dari masing-masing bagian belum terdapat kesamaan tentang arti pentingnya koordinasi di antara ahli untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Kesatupaduan atau keserasian, pertautan hubungan diantara sesama pegawai antara bagian yang satu dengan yang lainnya masih sulit untuk diwujudkan, karena pegawai masih bertindak secara berkelompok, sehingga untuk mewujudkan suatu integritas dan kesatuan yang kompak masih sulit dilaksanakan. Keserasian gerak untuk melaksanakan pekerjaan secara sistematis diantara bagian masih sulit, akibatnya bertindak secara berkelompok, sedangkan dalam organisasi yang sangat kompleks pandangan seperti itu harus dihilangkan. Adanya para pegawai yang bertindak secara berkelompok tadi itu, menjadikan kesatuan arah atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pemikiran tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Sundawa (2011:298) yang menyatakan bahwa “Koordinasi memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas organisasi Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung” artinya bahwa koordinasi sangat dominan dan menjadi prioritas dalam meningkatkan efektivitas organisasi.

Menciptakan mekanisme kerja perlu disertai koordinasi yang intensif untuk dilaksanakan pada masing-masing unit atau bagian atau antar organisasiyang saling terkait dan masing-masing pihak saling membutuhkan masukkan pihak lainnya untuk mencapai keberhasilan. Koordinasi antara masing-masing tersebut akan produktif, jika masing-masing pihak dapat merasakan manfaat hubungan antara unit atau bagian tersebut. Pelaksanaan koordinasi dan pengarahan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegawai ataupun kinerja organisasi sescara keseluruhan. Integrasi kegiatan melalui koordinasi, akan membantu mewujudkan tujuan tiap instansi. Untuk menunjang agar tujuan tersebut dapat tercapai, masing-masing instansi mempunyai wewenang dan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada atasannya masing-masing.

Hasil penelitian Sulistya (2008) mengatakan bahwa profesionalisme aparatur pemerintah dilihat dari aspek responsivitas dan inovasi yang dilakukan oleh pegawai di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang secara umum dapat dikatakan masih rendah yang dipengaruhi oleh pemahaman visi dan misi organisasi, wewenang dan tanggungjawab dalam struktur organisasi, kepemimpinan dan pemberian penghargaan yang kurang selaras dengan tujuan organisasi. Hal-hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius untuk menentukan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pemahaman di atas, maka aparatur daerah harus memiliki profesionalisme agar mampu melaksanakan tugas secara berkualitas disertai pelaksanaan koordinasi yang baik,termasuk aparatur yang ada pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008, bahwa dinas dan badan yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pelayanan pada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kota Bekasi dijadikan sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 1) Kota Bekasi merupakan pintu gerbang yang membatasi antara dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta. 2) Kota Bekasi merupakan daerah yang masih relatif baru dan merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Bekasi menuntut pelayanan publik yang berkualitas baik oleh dinas maupun badan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagian dinas dan badan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya mengalami hambatan, terutama yang berkaitan dengan efektivitas organisasi. Masalah efektivitas organisasi pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi yang cukup menjadi sorotan publik, baik kualitas, ketepatan waktu dan inisiatif kerjanya masih menunjukkan banyaknya permasalahan yang dihadapi. Hal ini menurut pemikiran peneliti dapat menjadikan kepada pencapaian tujuan organisasi tidak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penjajagan di lapangan, efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi belum optimal ditandai dengan indikator berikut :

1. Produktivitas kerja organisasibelum efektif di lihat dari indikator standar waktu pekerjaan yang telah ditetapkan organisasi, menyebabkan hasil kerja tidak sesuai harapan organisasi. Contoh : di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, proses kerja aparatur tidak sesuai standar operasional prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan surat perizinan. Adapun waktu penyelesaian seharusnya 5 (lima) hari kerja, kenyataan selesai dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Produktivitas kerja organisasi belum efektif dilihat dari indikator mutu hasil kerja organisasi. Contoh : di Bidang Perdagangan Disperindagkop, kurangnya aparatur bidang perdagangan dalam penyusunan data dan pengolahan data mengakibatkan tidak lengkapnya *data base* perusahaan sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi perizinan dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan. Dari 15 perusahaan yang mengajukan rekomendasi, hanya 5 perusahaan yang dapat diselesaikan dengan baik.
3. Produktivitas kerja organisasi belum efektif di lihat dari indikator standar waktu pekerjaan yang telah ditetapkan organisasi. Penggunaan waktu kerja aparatur rendah berkibat kepada hasil kerja tidak sesuai dengan tuntutan dari organisasi. Contoh : ketidaktepatan waktu pelaporan kegiatan rutin masing-masing SKPD kepada Bapeda dan Bagian Anggaran, yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana. Batas waktu pelaporan setiap akhir s/d awal bulan, pada kenyataannya pelaporan disampaikan pada pertengahan bulan (antara tgl 13 s/d 15).
4. Kepuasan dalam bekerja masih rendah di lihat dari indikator komunikasi antar organisasi, mengakibatkan proses dan hasil kerja tidak sesuai harapan organisasi. Contoh : Kurangnya komunikasi antar organisasi dalam menindaklanjuti temuan awal (konsep temuan awal) BPK-RI. Mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan Kepala Daerah seperti Surat Keputusan Pengakuan Piutang pada Dinas Bina Marga dan Tata Air tahun 2012. Standar waktu yang ditentukan ketika temuan awal BPK bulan April 2013 mestinya bulan Mei 2013 sudah diterbitkan SK Walikota tentang pengakuan piutang, namun sampai bulan Juni 2013 belum selesai.

Masalah-masalah tersebut di atas diduga antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan profesionalisme aparatur birokrasi dan koordinasi pada dinas dan badan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.Keluhan dan tuntutan masyarakat itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi aparatur di dalam melaksanakan fungsinya, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu optimalisasi peningkatan profesionalisme aparatur birokrasi untuk mampu bekerja secara produktif dan tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Begitu juga perlu optimalisasi pelaksanaan koordinasi pada tatanan implementatif dalam organisasi, agar efektivitas organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pemahaman di atas, maka aparatur birokrasi perlu memiliki profesionalisme agar mampu melaksanakan tugas dengan optimal disertai dengan koordinasi yang efektif, sehingga dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi akan mampu meningkatkan efektivitas organisasinya dengan optimal.

Atas dasar indikator indikator di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Profesionalisme Aparatur Birokrasi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Organisasi Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi”**.

* 1. **Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pernyataan masalah (*Problem Statement*) penelitian ini adalah : Belum optimalnya Efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, diduga antara lain disebabkan oleh belum optimalnya profesionalisme aparatur birokrasi dan koordinasi. Dari pernyataan masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan masalah (*Problem Question*) yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profesionalisme aparatur birokrasi, koordinasi dan efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi?
2. Berapa besar pengaruh profesionalisme aparatur birokrasi dan koordinasi terhadap efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi?
3. Berapa besar pengaruh profesionalisme aparatur birokrasi diukur melalui karakteristik harus ahli, mampu mandiri, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mampu menunjukan dirinya sebagai profesional, memegang teguh etika profesinya (*ethics*) dan memelihara hubungan baik dengan pihak lain terhadap efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi?
4. Berapa besar pengaruh koordinasi diukur melalui adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian, adanya kesepakatan kegiatan atau tindakan, adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak, adanya saling tukar informasi, adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan, adanya informasi dan adanya saling menghormati terhadap efektivitas organisasi pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi?
	1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis profesionalisme aparatur birokrasi, koordinasi dan efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme aparatur birokrasi dan koordinasi terhadap efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
3. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh profesionalisme aparatur birokrasi melalui karakteristik harus ahli, mampu mandiri, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mampu menunjukan dirinya sebagai profesional, memegang teguh etika profesinya (*ethics*) dan memelihara hubungan baik dengan pihak lain terhadap efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
4. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh koordinasi melalui adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian, adanya kesepakatan kegiatan atau tindakan, adanya ketaatan dari setiap pihak, adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama, adanya kerjasama, adanya informasi yang mengalir pada koordinator dan adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional terhadap efektivitas organisasi pada dinas dan badan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
	1. **Kegunaan Penelitian**
	2. Kegunaan Akademis/Ilmiah.

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi kajian ilmu administrasi publik pada umumnya, khususnya profesionalisme aparatur birokrasi, koordinasi dan efektivitas organisasi dalam melakukan upaya dan perbaikan tujuan dan fungsi administrasi publik terutama perbaikan mengenai kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

* 1. Kegunaan Praktis/Operasional.

Hasil Penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan profesionalisme birokrasi dan koordinasi dalam peningkatan efektivitas organisasi, sehingga temuannya dapat menjadi umpan balik yang bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme birokrasi dan koordinasi dalam perbaikan terhadap efektivitas organisasi pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.